Jejakdigital
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Available online at https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital

eISSN 3089-7734; pISSN 3089-7742
Vol. 2, No.6, Tahun 2026
doi.org/10.63822/vwd0tv15
Hal. 11962-11968

Peran Perangkat Desa dalam Mediasi Konflik Pencemaran Kotoran Kerbau di ADB 2 Kecamatan Meurebo Aceh Barat

Anin Nur Arfifah[1], Khairunnisa[2], Selida Fitria[3], Alhilma Sahara[4], Tasya[5], Hajatul Ulya[6], Tri Quari Handayani[7]
Universitas Teuku Umar[1-7]

*Email aninnurafifahaninnurrr@gmail.com[1], selidafitria648@gmail.com[2], 3alhilmasahara@gmail.com,[3]Tasyakembang06@gmail.com[4], hajatululya@gmail.com[5].

Sejarah Artikel:

Diterima 20-11-2026
Disetujui 25-11-2026
Diterbitkan 27-11-2026

ABSTRACT

This study discusses the role of village officials in mediating conflicts related to buffalo dung pollution in ADB2, Meureubo District West Aceh Regency. This problem is related to buffalo dung that afects the cleanliness and comfort of the community, as well as buffaloes roaming freely into residents land and damaging their crops. This study aims to identify and understand the role of village officials in addressing these problems, including responding to community complaints and helping resolve disputes between buffalo owners and landowners. This study uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews with the village secretary and community members, and documentation. The study focuses on the efforts of village officials to help resolve disputes through deliberation, discuss the losses experienced by the community, and prevent similar problems from occurring in the future. Therefore, this study seeks to understand how village officials handle conflicts related to the presence of buffaloes and maintain the comfort of the community within the village environment.

Keywords: *Village Officials, Conflict Mediation, Buffalo Dung, and Community*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran perangkat desa dalam mediasi konflik pencemaran kotoran kerbau di ADB 2, Kecamatan Meureubo,Kabupaten Aceh Barat. Permasalahan ini berkaitan dengan kotoran kerbau yang mengganggu kebersihan dan kenyamanan masyarakat serta kerbau yang berkeliaran hingga memasuki lahan milik warga dan menyebabkan kerusakan tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran perangkay deda dalam menangani permasalahan tersebut, termasuk menangani keluhan masyarakat dan membantu menyelesaikan perselisihan antara pemilik kerbau dan pemilik lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan sekretaris desa dan masyarakat, serta dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada upaya perangkat desa dalam membantu menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah, membahas kerugian yang dialami masyarakat dan mencegah terjadinya permasalahan serupa. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana perangkat desa menangani konflik yang berkaitan dengan keberadaan kerbau dan menjaga kenyamanan masyarakat di lingkungan desa.

Kata Kunci:Perangkat Desa, Mediasi konflik, kotoran kerbau,masyarakat.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Arfifah, A. N., Khairunnisa, K., Fitria, S., Sahara, A., Tasya, T., Ulya, H. ., & Handayani, T. Q. . (2026). Peran Perangkat Desa dalam Mediasi Konflik Pencemaran Kotoran Kerbau di ADB 2 Kecamatan Meurebo Aceh Barat. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11962-11968. https://doi.org/10.63822/vwd0tv15

PENDAHULUAN

Desa merupakan tempat masyarakat melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kegiatan yang masih banyak dilakukan masyarakat desa adalah memelihara ternak. Pelihara hewan ternak dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya, akan tetapi, keberadaan ternak juga dapat menimbulkan masalah apabila tidak diperhatikan dengan baik. Salah satu masalah yang dapat muncul adalah kotoran ternak yang berada di sekitar lingkungan masyarakat .Berdasarkan hasil penelitian, banyak ditemukan rumah penduduk dalam radius 500 m dari lokasi peternakan. Jarak tersebut tergolong dekat dan menyebabkan penyebaran bau tidak sedap, peningkatan polusi lalat, serta pencemaran air sumur (Rahmawati D. dan Santoso E. B. 2021). Keberadaan ternak yang berdekatan dengan permukiman dapat menimbulkan persoalan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.Yang dapat memicu gangguan Kesehatan seperti iritasi pernapasan pusing dan stress psikologis (Nurlaela,2022) karna itu terdapat tantangan berupa pengelolaan libah dan keberlanjutan lingkungan maka di perlukan upaya pengelolaan yang lebih efektif (Putra dan Sari, 2019)

Masalah yang berkaitan dengan ternak bukan hanya tentang kotorannya.Ternak yang dibiarkan berkeliaran menjadi pokok masalah karena dapat masuk ke lahan orang dan menyebabkan kerusakan tanaman serta kerugian bagi pemilik lahan.Keadaan ini dapat menimbulkan sengketa antara pemilik ternak dan pemilik lahan. Konflik ini dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama (Anisasam, kmalarangan, dan Hasnawati,2025), Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian yang baik agar permasalahan ini tidak berlarut. Dalam kasus ini, perangkat desa dapat membantu masyarakat menangani permasalahan yang berkaitan dengan hewan ternak. Permasalahan ini juga terdapat di Desa Adb 2, Kecamatan Mereubo, Kabupaten Aceh Barat. Keberadaan kerbau di lingkungan masyarakat tentu dapat menimbulkan persoalan, terutama kotoran yang berserakan di perkarangan rumah warga atau saat kerbau masuk ke lahan persawahan masyarakat. Kondisi tersebut dapat mengganggu kenyamanan serta menyebabkan kerugian panen. Selain itu, limbah peternak yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu lingkungan sekitar. Uap yang berasal dari kotoran hewan, urin, dan sisa pakan juga dapat menyumbang terhadap pencemaran udara (Marganingsih dan Hartono, 2021).

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan adanya aturan yang berlaku di desa.Perangkat desa menjelaskan adanya kanun yang mengatur ternak yang berkeliaran dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Apabila ternak masuk ke perkebunan atau persawahan milik orang lain dan menyebabkan kerugian, maka kerugian tersebut perlu diselesaikan. Apabila pihak yang terlibat tidak dapat mencapai sepakatan. Masalah tersebut dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Selain itu terdapat penelitian terdahulu lainnya(Fatih Zikri Aulia, 2026). Pasal Qanun Kabupaten Gayo Lues nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak secara tegas melarang setiap pemilik ternak untuk melepas liarkan hewan ternaknya di jalan umum, lingkungan permukiman,serta area perkebunan warga guna menjaga ketertiban dan kebersihan serta keselamatan lingkungan. Akan tetapi, disayangkan tidak semua masyarakat yang merasa terganggu menyampaikan keluhannya kepada perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dirasakan masyarakat belum tentu seluruhnya diketahui atau ditangani oleh perangkat desa. Kondisi tersebut menandakan pentingnya untuk dilihat karena perangkat desa memiliki peran dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan desa. Seharusnya pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum formal, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan sosial (Muhamad Khalid, Arista Chandra Irawati dan Indra Yuliawan 2025). Oleh karena itu, penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam mengatasi limbah peternakan juga menjelaskan bahwa pemerintah desa dapat menjalankan peran sebagai fasilitator, mediator, serta menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan dan peternakan. Sangat jelas bahwa penting

untuk melihat bagaimana peran perangkat desa dalam menangani permasalahan yang terjadi di, Adb2 Kec Mereubo Kab Aceh Barat. Penelitian ini secara khusus ingin mengungkapkan sikap perangkat desa dalam memediasi konflik dalam masyarakat. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada: (1)Bagaimana peran perangkat desa dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan ternak kerbau di desa; (2) Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai bau kotoran kerbau yang menyengat di perkarangan rumah warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat keterangan dari masyarakat dan perangkat desa serta hasil pengamatan di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kondisi sosial berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan adanya kerbau dan kotoran kerbau serta melihat peran perangkat desa dalam menangani keluhan masyarakat. Penelitian dilakukan di Adb 2 kec. Mereubo Kab. Aceh Barat. Menurut peneliti, lokasi ini perlu ditinjau karena adanya permasalahan kotoran kerbau yang mengganggu kebersihan dan kenyamanan masyarakat.

Terdapat 5 informan salah satu di antaranya Sekdes Gapong (sekretaris) Desa dan masyarakat yang tinggal di daerah Adb 2. Sekdes diwawancarai untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai keluhan dan penanganan masalah ternak kerbau di desa. Sebaliknya, wawancara, dengan masyarakat dilakukan untuk mengetahui keresahan dan kondisi lingkungan tempat tinggal dan mengetahui nyaman atau tidaknya masyarakat dengan kotoran yang sering bercecer serta kerau yang masuk ke lahan milik warga. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi,Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan ke lapangan untuk melihat kondisi lingkungan dan memahami permasalahan yang akan diteliti, Setelah observasi, peneliti melakukan sesi wawancara pertama dengan sekdes dan seterusnya bersama masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih detail, Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data selama melakukan penelitian. Data penelitian dan analisis menggunakan tiga tahap. Pertama, reduksi data untuk memilih informasi hasil observasi dan wawancara sesuai dengan fokus penelitian., Kedua, penyajian data untuk menyusun informasi dalam bentuk uraian agar dapat dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan yaitu merangkum hasil penelitian untuk menjelaskan peran perangkat desa dalam menangani permasalahan ternak kerbau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan sekretaris desa, peraturan mengenai ternak yang memasuki lahan masyarakat telah berlaku sejak lama. Pemilik ternak yang membiarkan kerbau berkeliaran hingga merusak lahan atau fasilitas warga dapat dikenai denda sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan Qanun yang berlaku. Apabila pemilik ternak tidak bertanggung jawab, perangkat desa dapat membawa permasalahan tersebut kepada pihak berwajib. Penyelesaian konflik dilakukan melalui mediasi atau musyawarah dengan mempertemukan pemilik lahan untuk mencapai kesepakatan bersama serta mencegah perselisihan berkepanjangan. Selain itu, hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun masih menjadi pedoman masyarakat Gampong Adb 2, Sebagian masyarakat merasa terganggu dengan kerbau yang berkeliaran dan kotoran di halaman rumah masyarakat. Masyarakat pernah menegur pemilik ternak, tetapi teguran tersebut

kurang mendapat tanggapa., Sebagian masyarakat juga merasa jenuh menyampaikan keluhan kepada pemilik ternak bahwa kerbau yang berkeliaran dapat menyebabkan kecelakaan. Di sisi lain, sekretaris desa menjelaskan bahwa terdapat kegiatan gotong royong yang dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan ada masyarakat luar yang membersihkan kotoran kerbau untuk diKelola menjadi pupuk.Namun, kegiatan tersebut tidak dilakukan secara rutin.Ada hari ketika masyarakat ini membersihkannya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kerbau di Gampong adb 2 tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemilik ternak dan hubungan antarwarga. Jika dikaitkan dengan teori konflik sosial Lewis A. Coser, permasalahan ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik ternak dan masyarakat yang menginginkan lingkungan bersih, aman dan nyaman. Oleh karna itu, peran perangkat desa sangat penting dalam memfasilitasi mediasi, menegakkan aturan dan hukum adat, serta mendorong kerja sama melalui gotong royong. Dengan adanya komunikasi dan tanggung jawab dari semua pihak, konflik diharapkan dapat di selesaikan dengan baik sehingga tidak berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan.



Gambar 1 : Bersama Sekdes Gampong UTD



Gambar2 : Limbah ternak kerbau yang sudah basah



Gambar 3 Kerbau Yang Berkeliaran di tengah jalan

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kerbau di lingkungan masyarakat masih menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satunya adalah kotoran kerbau yang menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kebersihan lingkungan, terutama ketika bau tersebut sampai ke lingkungan rumah warga. Selain itu, kerbau yang berkeliaran dan memasuki lahan milik warga juga dapat menyebabkan perselisihan antara masyarakat dan pemilik ternak, Keadaan ini memperlihatkan adanya konflik sosial yang muncul karena perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemilik ternak. Permasalahan ini juga menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak. Masyarakat dan pemilik ternak perlu saling memahami serta ikut menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat agar kebersihan dan kenyamanan lingkungan dapat terjaga dengan baik. Hal ini juga menunjukkan pentingnya kebersihan lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama, baik masyarakat maupun pemilik ternak.Masyarakat di harapkan tidak ragu menyampaikan keluhan atau kedala yang mereka alami kepada prangkat gampong. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi antara masyarakat dan aparat gampong.Apa pun permasalahan yang terjadi di lingkungan, langsung disampaikan agar dicarikan penyelesaiannya. Apart gampong juga diharapkan lebih dekat dengan masyarakat serta menjaga kenyamanan masyarakat.

Salah satu saran yang dapat diterapkan untuk mengadakan pembersihan jalan umum satu kali dalam seminggu dengan melibatkan seluruh pemilik ternak . Meskipun kotoran yang berada di jalan belum tentu berasal dari ternak milik seseorang secara langsung, pemilik ternak juga menggunakan jalan umum. Dengan begitu, kebersihan jalan dapat dijaga bersama dan tidak hanya dibebankan kepada masyarakat yang merasa terganggu. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan pembahasan mengenai permasalahan hewan ternak dan kotorannya dapat dikaji lebih luas dengan melibatkan masyarakat, pemilik ternak, serta apparat gampong. Dengan demikian, dapat diketahui lebih jelas bagaimana setiap pihak memahami permasalahan dan ikut mencari penyelesaiannya. Pada akhirnya, diperlukan kerja sama antara masyarakat, pemilik ternak, dan aparat gampong agar tercipta lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman bagi semua warga.

REFERENSI

Aryani, A, 2024. STRATEGI PEMBAGUNAN USAHA ANGRIBISNIS AYAM RAS PETELUR DIKABUPATEN BONE, PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Aulia, F.,2026 implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak(studi kasus gayo Lues).

Fazela ,D.,2013. *Resolusi konflik antara Negara Lubuak Malako, kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok selatan , s.I..s.n.*

Hartono, 2021. Peran pemerintah Desa dalam mengatasi limbah peternak sapi perah. *Publiciana*,14(1), pp.242 255.

Khalali, M., irawati,A.C.& Yuliawan ,l., 2025. Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Memediasikan Konflik masyarakat Desa Monga. Pendes *: Jurnal ilmiah Pendidikan dasar* , Volume 10, pp. 121 137.

Marganingsih, D.i. Hartono L, 2021. Peran pemerintah desa dalam mengatasi limbah ternak sapi perah. Vol.XIV(1),p.25.

Nurlalea, 2022. Analisis Kesehatan masyarakat disekitar peternak ungags. Studi kasus pencemaran udara dan dampak. *Indonesia journal off public Health*, 17(1) 78 92.

Rahmawati, D. santoso, 2021. Zonasi peternakan dan pemukiman analiss jarak optimal untuk minimalkan dampak lingkungan jurnal perencanaan wilayah dan kota, H, 32(2) 134 148.

Sam, R, Malarang, K Hasnawati ,H ., 2025. Konflik Antara Warga Desa dan RARAMPANDENDE DAN DESA PESAKU DIKABUPATEN SIGI. Jurnal ilmu hukum, 2(3).63 70.

Suparlan p., 2002. Menuju masyarakat Indonesia yang multicultural. *Jurnal Aantropologi Indonesia*, 69(1).98 105.